

# Hubungan Antara Pola Konsumsi dan Intensitas Diskusi Berita Korupsi Terhadap Partisipasi Politik Konstituen Pilkada DKI Jakarta 2017

**MELISA INDRIANA PUTRI**

*Universitas Pertamina*

---

*melisaiputri@gmail.com*

p-ISSN : 2477-118X

## **ABSTRAK**

Perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadi perjalanan panjang yang hingga kini masih menjadi perhatian banyak pihak. Media menjadi salah satu pihak yang memiliki kapasitas untuk mengawal aparat dalam menumpas tindakan tidak beretika tersebut. Korupsi kerap kali bersanding dengan sektor politik yang dapat ditunjukkan melalui tema-tema berita di beberapa media daring terpopuler seperti detik.com, republika.co.id, tribunnews.com, kompas.com, dan viva.co.id. Selama setahun sebelum dihelatnya

Pilkada DKI Jakarta 2017, pemberitaan di berbagai kanal media dengan kompak menampilkan kasus korupsi yang melibatkan nama-nama seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sylviana Murni, dan Anies Baswedan. Ketiga sosok tersebut sama-sama melaju ke Pilkada DKI Jakarta 2017. Hasil analisis isi terhadap konten berita korupsi pada lima kanal berita daring tersebut menunjukkan bahwa Ahok menjadi sosok yang paling banyak disebut pada berita-berita kasus korupsi. Namun, hasil Pilkada putaran pertama berhasil dimenangkan oleh Ahok-Djarot. Efek media yang memiliki pengaruh kuat pada khalayak menjadi perlu dicermati kembali. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan faktor-faktor selain faktor media yang memiliki kaitan dengan partisipasi politik warga DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan paradigma positif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian mencakup semua masyarakat yang terdata pada Daftar Pemilih Tetap dalam Pilkada Jakarta 2017 yang sekaligus pernah mengonsumsi berita-berita tersebut. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik *cluster random sampling* dengan batas kelonggaran 10% sehingga diperoleh 100 orang responden. Variabel dan kategori diturunkan dari Teori *Uses and Gratification* yang kemudian dianalisis menggunakan Kendall's Tau. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara intensitas diskusi berita korupsi paslon dengan partisipasi politik konstituen lebih kuat dari pada hubungan antara pola konsumsi berita korupsi paslon dengan partisipasi politik konstituen. Para konstituen cenderung lebih memercayai informasi yang bersumber dari orang-orang terdekat mereka. Penelitian ini merekomendasikan, media tidak cukup dalam memainkan peran sebagai agen antikorupsi, karena orang-orang terdekat konstituenlah yang memiliki kekuatan paling besar dalam memengaruhi pandangan khalayak mengenai korupsi secara umum maupun kasus korupsi yang dilekatkan oleh media terhadap para paslon.

**Kata Kunci:** Berita Korupsi, Media Daring, Pilkada DKI Jakarta, *Uses and Gratification*.

## ABSTRACT

*Combating corruption in Indonesia has been a crucial concern among the people. Media becomes one of the crucial factors in the fight against corruption effectively. Corruption has long become a political issue which can be identified through the news in some of the most famous online media such as detik.com, republika.co.id, tribunnews.com, kompas.com, and viva.co.id. A year before the 2017 DKI Jakarta Gubernatorial Election, media coverage on various media channels published corruption issues involving gubernatorial candidates such as Basuki Tjahaja Purnama, Sylviana Murni, and Anies Baswedan. The three figures are running for Governor and Vice Governor to DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017 with their political partner. The result of content analysis on corruption news among five daring news channels shows that the Ahok's name has been most mentioned in the corruption news before the election. However, Ahok-Djarot won the first round of the election. That indicates that we need to rethink whether the media messages have a powerful effect on their audience. This research also aims to explain the relationship of other factors that have relevance to the political participation of DKI Jakarta citizens. This study describes reality through positivistic paradigm with survey approach. The population includes all the registered Voters in the DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017 which once consumed the news. Cluster random sampling technique determined sampling in margin error of 10% to obtain 100 respondents. Variables and categories are derived from Uses and Gratification theory and then analyzed using Kendall's Tau. This study shows the strong relationship between the intensity of corruption news discussion activities with the political participation of voters. The relationship between the consumption of corruption news with political participation of citizens is not stronger than the previous variable. In the end, this research recommends that the media insufficient in playing its role as an anti-corruption agent because the people nearby to constituents are the ones who have the greatest influence.*

**Keywords:** *Corruption News, DKI Jakarta Gubernatorial Election, Online Media, Uses and Gratification.*

## PENDAHULUAN

Kasus korupsi di Indonesia menjadi masalah yang mengakar kuat dan belum kunjung usai hingga kini. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia masih rendah. Lembaga Indonesia Network Election Survey (INES) menemukan bahwa 94,8 persen masyarakat Indonesia belum puas dengan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, serta Kehakiman. Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak puas dengan lemahnya efek jera dalam penanganan kasus korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor politik (Wibisono, 2012).

Indonesian Corruption Watch (ICW) berhasil memantau data kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2014. Fakta yang ditunjukkan melalui data-data tersebut adalah adanya 629 kasus korupsi yang melibatkan 1.328 orang tersangka hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 5,29 triliun. Pada kesempatan lain, Lembaga Transparency International (TI) yang berbasis di Berlin merilis data Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi-IPK) pada tahun 2015 yang melibatkan 168 negara. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menduduki peringkat 88. Hal tersebut menunjukkan adanya efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, level Indonesia dalam survei tersebut masih belum mencapai target pemerintah dan berada di bawah IPK rata-rata negara Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Hal ini berarti bahwa kasus korupsi di Indonesia masih perlu mendapat perhatian berbagai pihak serta didukung dengan langkah-langkah inovatif dan preventif untuk mereduksi berbagai upaya yang menimbulkan tindakan korupsi (Anugerah, 2016; indonesia-investments.com, 2017; tempo.co, 2016).

Selain menimbulkan kerusakan dan kerugian pada segala sendi kehidupan suatu bangsa, korupsi juga menjadi perilaku yang tidak etis. Hal ini terjadi karena korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan posisi atau wewenang demi kepentingan pribadi atau golongan serta mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (Ndoda, 2014: 2). Korupsi sebagai perbuatan yang melanggar etika publik dapat merusak kepercayaan publik pada pemerintah, terlebih bagi negara dengan sistem demokrasi. Dalam konteks ini, masyarakatlah yang menentukan siapa yang berhak memimpin mereka. Oleh karenanya, para calon pemimpin suatu daerah di Indonesia memerlukan kepercayaan tinggi dari masyarakatnya. Seorang pemimpin suatu negara atau daerah perlu bersih dari tindakan korupsi dan mendukung usaha penumpasan tindakan tak beretika tersebut.

Laswell dalam Baran dan Davis (2012: 178) menegaskan bahwa media memiliki peran dalam menyebarkan informasi, sekaligus menjadi pengawas bagi semua sektor dalam suatu negara. Tugas-tugas pengawasan tersebut dapat ditunjukkan melalui penyebaran informasi pada publik mengenai adanya praktik korupsi di sektor politik sebagai suatu tindakan yang tak beretika. Media konvensional seperti radio, koran, dan televisi di Indonesia dahulunya terlahir dengan semangat untuk mengungkap nilai-nilai kebajikan dan menyampaikan kebenaran.

Munculnya media daring, idealnya mampu melanjutkan semangat pendahulunya. Kekuatan media daring yang mampu menembus kognisi manusia melalui sapuan jari-jari seharusnya masih sejalan dengan semangat untuk membantu upaya melawan korupsi. Oleh karenanya, media perlu memberikan perhatian lebih pada pemberitaan-pemberitaan korupsi di sektor politik untuk mengawasi sikap dan perilaku seorang pemimpin atau calon pemimpin suatu daerah. Hal tersebut perlu dilakukan oleh media guna menyebarkan gagasan positif dalam memberantas tindakan korupsi.

Pengawasan yang dilakukan media daring dalam menjauhkan pemimpin daerah dari tindakan korupsi ditunjukkan melalui indeks berita bertema korupsi sepanjang tahun 2016. Salah satu pimpinan

daerah yang namanya turut disebutkan dalam pemberitaan kasus korupsi pada tahun 2016 adalah Basuki Tjahaja Purnama atau yang populer dikenal Ahok. Ketika Ahok kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017 dan berdampingan dengan Djarot, dua pasangan calon lainnya, yakni Agus-Sylvi dan Anies-Sandi pun menjadi sasaran media melalui beberapa berita bertema korupsi.

Hasil analisis isi secara tematik yang telah dilakukan oleh peneliti pada berita-berita bertema korupsi yang memuat subjek para pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 di detik.com, republika.co.id, tribunnews.com, kompas.com, dan viva.co.id selama Februari 2016 hingga Februari 2017 menunjukkan beberapa kecenderungan yang tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 01.** Hasil Analisis Isi Tematik tentang Berita Korupsi Melibatkan Paslon

No	Situs Berita Daring	Daily Page Views Per Visitor	Berita Korupsi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang Memuat Nama Para Pasangan Calon		
			Ahok-Djarot	Agus-Sylvi	Anies-Sandi
1	detik.com	4.85	73,9 (%)	15,9 (%)	10,2 (%)
2	Republika.co.id	3.95	21,4 (%)	78,6 (%)	0 (%)
3	Tribunnews.com	3.93	31,3 (%)	37,4 (%)	31,3 (%)
4	Kompas.com	3.61	46,7 (%)	13,3 (%)	40 (%)
5	Viva.co.id	3.07	50 (%)	41,7 (%)	8,3 (%)
<b>Total</b>			<b>58,1 (%)</b>	<b>25,7 (%)</b>	<b>16,2 (%)</b>

Sumber: Hasil olah penelitian.

Selama kurun waktu Februari 2016 hingga Februari 2017, terdapat 58,1 % berita korupsi yang mengulas korupsi dengan menyebutkan nama Ahok pada berita korupsi kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS). Selain itu, muncul pula kasus korupsi yang turut menghadirkan sosok Sylviana Murni. Berita tersebut mulai diketahui oleh khalayak sejak Januari 2017. Sylvi diberitakan beberapa kali terkait kesaksiannya pada kasus dana hibah Pemerintah Provinsi DKI ke Kwartir Daerah Gerakan Pramuka 2014-2015 serta kasus terkait pembangunan Mas-

jid Al-Fauz di Kompleks Wali Kota Jakarta Pusat. Sedangkan Anies Baswedan diberitakan juga dalam kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana dalam Pameran *Frankfurt Book Fair*. Persentase berita korupsi yang memuat nama Sylvi maupun Anies berturut-turut adalah sebesar 25,7% dan 16,2%.

Berita sebagai pesan yang didiseminasikan media massa, memerlukan waktu untuk dapat memberikan efek pada khalayak. Berita-berita dengan tema korupsi yang telah berhembus selama satu tahun dapat menjadi referensi lain bagi publik untuk menilai masing-masing paslon yang sedang bertanding. Citra negatif yang timbul akibat berita-berita korupsi dapat memengaruhi kognisi maupun sikap para pemilih dalam menentukan calon yang akan mereka dukung.

Hasil penelitian menemukan bahwa pasangan Ahok-Djarot menjadi yang paling banyak diberitakan media daring dalam berita-berita kasus korupsi dalam berbagai sudut pandang, yakni sebesar 58,1%. Sedangkan keseluruhan pemberitaan korupsi yang menyebutkan nama pasangan Agus-Sylvi sebesar 25,7% dan dan Anies-Sandi sebesar 16,2%. Selanjutnya, jika kita melihat hanya pada pemberitaan yang bernada negatif saja maka nama Ahok-Djarot dapat ditemukan pada 8,78% berita-berita korupsi. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan berita bernada negatif dari dua pasangan calon lainnya, yakni sebesar 7,43% untuk Agus-Sylvi, serta 3,38% untuk Anies-Sandi. Meskipun berita negatif Ahok-Djarot dalam tema korupsi memiliki jumlah yang terbesar, namun perolehan suara Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Pertama justru yang terunggul di antara para paslon lainnya. Pasangan calon Ahok-Djarot dapat memperoleh 2.357.587 suara (42,91%). Sedangkan pasangan Agus-Sylvi dan Anies-Sandi secara berurutan memperoleh 936.609 suara (17,05%) dan 2.200.636 suara (40,05%) dari 5.563.425 konstituen yang menggunkan hak pilihnya (Putra, 2017).

Kenyataan tersebut mendorong peneliti untuk lebih mendalami fenomena yang menyertainya. Media diyakini memiliki pengaruh yang kuat bagi khalayak, namun hal itu juga dipengaruhi oleh fak-

tor-faktor di luar media. Penelitian ini hendak membeberkan faktor-faktor nonmedia seperti apakah yang berkaitan dengan hal tersebut. Peneliti juga bermaksud menjelaskan sejauh mana berita daring yang memberitakan kasus korupsi yang menyebutkan nama-nama para paslon ini melakukan penetrasi dalam benak, sikap, maupun perilaku konstituennya. Peneliti juga akan menjelaskan bagaimana hubungan antara keberadaan berita korupsi tersebut dengan pengaruh sosial dan partisipasi yang dilakukan konstituen.

### 1. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menggunakan *Uses and Gratification Theory* sebagai pisau bedah utama untuk menelisik bagaimana preferensi konstituen yang sekaligus konsumen berita korupsi dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2017. Teori yang dibesarkan oleh Elihu Katz, Jay Blumler, dan Michael Gurevitch (Ruben & Stewart 2006: 373-374) tersebut memberikan kritik pada anggapan sebelumnya bahwa media merupakan satu-satunya faktor determinan dalam mengubah kognitif, sikap, maupun perilaku khalayak. Teori ini memberikan pandangan berbeda bahwa khalayak adalah subjek yang aktif dalam menyikapi konten media. Hubungan antara khalayak dan media tidak sekadar terhubung langsung melalui konten dan efek yang dihasilkan, tetapi juga melibatkan faktor-faktor selain media.

Teori ini menjadi perpanjangan dari *Extension of needs and Motivation Theory* dari Abraham Maslow dengan menjelaskan bahwa manusia juga memiliki kebutuhan, hasrat, atau tujuan yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, khalayak memiliki motivasi ketika mengonsumsi konten tertentu, termasuk berita korupsi yang melibatkan para pasangan calon. Selain itu, konsumsi media juga melibatkan beberapa faktor individual, seperti aktivitas interpersonal maupun sosial (West & Turner 2007: 425).

Beberapa asumsi pada teori ini adalah (Griffin 2012: 358-361; West & Turner 2007: 428):

1. Khalayak bersifat aktif dan memiliki tujuan tertentu dalam



mengonsumsi media. Khalayaklah yang memiliki kendali atas konten media dan menggunakannya untuk maksud tertentu. Media yang sama dapat digunakan setiap orang demi mencapai kebutuhan yang tidak seragam.

2. Inisiasi dalam mengonsumsi media yang dianggapnya dapat memenuhi kebutuhannya sepenuhnya merupakan pilihan khalayak. Khalayak berusaha memenuhi kepuasannya dengan mengonsumsi media yang dikehendakinya.
3. Media saling bersaing untuk memberikan kepuasan bagi khalayak dengan mencuri waktu mereka.
4. Khalayak memiliki cukup kesadaran terhadap ketertarikan, dan motif dalam menggunakan media. Khalayak dapat dengan sadar menjelaskan apa tujuannya ketika mengakses suatu media berikut dengan kontennya.
5. Nilai-nilai yang terkandung pada konten media hanya dapat diapresiasi oleh khalayak secara personal. Khalayak media tidaklah identik sehingga pengaruh yang dimunculkan media pun bersifat relatif antar setiap orangnya.

Teori *Uses and Gratification* juga menawarkan klasifikasi tentang berbagai jenis kebutuhan dan kepuasan khalayak seperti yang disebutkan dalam tabel berikut:

**Tabel 02.** Kategori dalam Teori *Uses and Gratification* Sumber: McQuail dkk dalam West dan Turner 2007: 428-429.

Tipe Kebutuhan Audiens	Deskripsi
<i>Diversion</i>	Pelarian diri khalayak dari rutinitas dan masalah keseharian
<i>Personal relationships</i>	Khalayak menganggap media sebagai teman dekatnya
<i>Personal identity</i>	Pendorong nilai-nilai yang diyakininya
<i>Surveillance</i>	Sekumpulan informasi mengenai bagaimana media dapat mendukung khalayaknya dalam mencapai sesuatu
<i>Cognitive</i>	Memenuhi kebutuhan informasi, pengetahuan, maupun pemahaman
<i>Affective</i>	Berkaitan dengan pengalaman emosi ataupun estetika
<i>Personal Integrative</i>	Meningkatkan kredibilitas, kepercayaan diri, dan status

<i>Social Integrative</i>	Meningkatkan hubungan dengan keluarga, teman, sahabat, dan relasi lainnya
<i>Tension Release</i>	Kesenangan dan hiburan

## 1. Konsep Partisipasi Politik

Nimmo (2006: 125-126) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berpartisipasi dalam aktivitas komunikasi politik disebut sebagai aktor politik. Aktor politik ini terdiri dari politikus, profesional, dan aktivis. Keberadaan mereka didukung pula oleh komunikator politik lainnya, yakni para konstituen. Program-program kampanye yang didesain oleh profesional dan selanjutnya dibawakan oleh politikus merupakan pesan politik hasil interaksi sebelumnya dengan konstituennya. Partisipasi politik ini memiliki bermacam-macam dimensi, mulai dari menjadi simpatisan hingga pemberian suara pada calon tertentu. Setiap konstituen memiliki bentuk dan jenis yang berbeda dalam menunjukkan partisipasi politiknya. Berikut adalah dimensi-dimensi gaya konstituen dalam berpartisipasi:

**Tabel 03.** Dimensi Partisipasi Politik Sumber: Nimmo (2006: 127-132).  
Sumber: Nimmo (2006: 127-132)

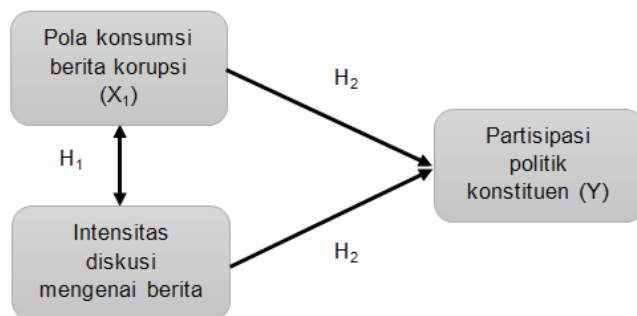
Dimensi Partisipasi Politik	Kategori
Gaya Partisipasi	Langsung atau perwakilan
	Kentara atau tidak kentara
	Individual atau kolektif
	Sistematis (terencana) atau acak
	Berkomitmen atau tidak berkomitmen
Motif Partisipasi	Sengaja atau tidak sengaja
	Rasional atau emosional
	Diarahkan dari dalam atau dari luar
	Berpikir atau tanpa berpikir
Konsekuensi Partisipasi	Fungsional atau disfungsional
	Sinambung atau terputus
	Mendukung atau menuntut

## 2. Variabel Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan asumsi-asumsi teori

tersebut, selanjutnya peneliti menentukan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang digambarkan dalam bagan berikut:

**Gambar 1.** Variabel Penelitian



Sumber: Hasil olah penelitian.

#### Keterangan:

1. X<sub>1</sub> (Pola konsumsi berita korupsi) = Variabel independen 1 Khalayak memiliki motivasi dan tujuan yang beragam ketika mengakses suatu berita korupsi, mulai dari pelarian, hiburan, pemenuhan informasi, pengetahuan, kebutuhan lainnya, serta anggapan bahwa berita korupsi penting untuk dikonsumsi. Pola konsumsi berita korupsi berkaitan dengan seberapa banyak berita yang diakses ataupun bagaimana cara memperoleh media.
2. X<sub>2</sub> (Intensitas diskusi berita korupsi) = Variabel independen 2 Seseorang dapat melakukan pengungkapan identitas politiknya dalam mendukung atau menolak suatu kandidat. Pembicaraan atau pembahasan mengenai korupsi yang dilakukan kandidat yang didukungnya menjadi hal yang menarik perhatiannya (Nimmo 2005: 110).
3. Y (Partisipasi politik konstituen) = Variabel dependen Penelitian ini lebih memfokuskan pada partisipasi politik dalam dimensi pemberian suara.

### Hipotesis

$H_1 = X_1 \leftrightarrow X_2$  : Terdapat hubungan secara resiprokal antara pola mengonsumsi berita korupsi dengan intensitas diskusi berita korupsi oleh konstituen.

$H_2 = X_1 \rightarrow Y$  : Terdapat hubungan antara pola mengonsumsi berita korupsi oleh konstituen dengan partisipasi politik konstituen.

$H_3 = X_2 \rightarrow Y$  : Terdapat hubungan antara intensitas diskusi berita korupsi dengan partisipasi politik konstituen.

### 1. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara beberapa variabel. Variabel yang hendak dijelaskan hubungannya dalam penelitian ini adalah variabel independen, yakni pola konsumsi berita korupsi dan intensitas diskusi berita korupsi yang memiliki hubungan dengan variabel dependen berupa partisipasi politik konstituen. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei.

Populasi adalah keseluruhan objek yang diamati dalam penelitian yang dapat berupa manusia, kata-kata, simbol nonverbal, koran, radio, televisi, internet, dan lainnya (Kriyantono 2006: 151). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konstituen dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Jika diterjemahkan lebih lanjut, mereka adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Jakarta dan tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Pertama. Total keseluruhan populasi ini berjumlah 7.108.589 orang. Penelitian ini membahas efek pesan berita korupsi yang mereka konsumsi melalui media daring sehingga jumlah populasi juga akan dibatasi hanya pada audiens yang mengonsumsi berita korupsi para pasangan calon yang muncul pada kanal detik.com, republika.co.id, tribunnews.com, kompas.com, dan viva.co.id dalam setahun terakhir.

Selanjutnya, peneliti mengelompokkan populasi yang ada dalam beberapa kategori atau *cluster* sehingga peneliti dapat melakukan pengambilan sampel menggunakan teknik *cluster random sampling*. Teknik ini dipilih karena populasi penelitian tersebar secara luas di berbagai wilayah DKI Jakarta sehingga diperlukan kategori yang lingkungannya lebih sempit agar memudahkan pengambilan sampel (Babbie 2008: 231). Teknik *cluster* ini pun dapat dilakukan dengan cara yang bervariasi tanpa memerlukan kerangka sampling. Peneliti tidak memiliki kerangka sampel berupa pembaca berita daring yang dimaksud sehingga penentuan *cluster* berupa kategori kecamatan yang akan diberikan survei penelitian.

Adapun ukuran sampel ditentukan dengan rumus *Slovin* karena populasi berjumlah besar dan telah diketahui jumlahnya. *Sampling error* atau batas kelonggaran ketidakteelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah 10% sehingga tingkat kepercayaan yang diperoleh adalah 90%. Besar sampel yang diperoleh adalah 100 orang dengan cara perhitungan sebagai berikut:

**Keterangan:**

$n$  = Ukuran sampel

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{7.108.589}{1 + 7.108.589 \times (10\%)^2} = 99,99 \Rightarrow 100$$

$N$  = Ukuran populasi

$e$  = Batas kelonggaran ketidakteelitian

Skala pengukuran yang digunakan pada masing-masing variabel adalah skala ordinal. Skala ordinal digunakan untuk membedakan suatu ukuran dengan memberikan atribut lebih besar

atau lebih kecil. Validitas skor diperlukan untuk melihat apakah instrumen yang digunakan bernilai valid. Peneliti menggunakan rumus *Pearson's Product Moment* sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2] [n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

$r$  : Koefisien product moment

$n$  : Jumlah individu dalam sample

$X$  : Angka mentah untuk pengukuran 1

$Y$  : Angka mentah untuk pengukuran 2

### **Definisi Operasional Variabel**

1. Tingkat kebutuhan akses berita korupsi
  - a. Pengisi waktu luang
  - b. Ketergantungan atau kebutuhan
  - c. Menemukan kesamaan pandangan dengan media
  - d. Meningkatkan kepercayaan diri
2. Intensitas diskusi berita korupsi
  - a. Kedekatan dengan lawan bicara
  - b. Pasangan calon yang sama
  - c. Frekuensi diskusi
  - d. Berbagi informasi
3. Pola konsumsi berita korupsi
  - a. Frekuensi
  - b. Kepuasan
4. Partisipasi politik konstituen

- a. Mengajak orang lain untuk memberikan suara
- b. Percaya dengan kandidatnya
- c. Memberikan suara

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengkodean data sehingga data tersebut dapat dimaknai hasilnya. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan dengan uji statistik karena data pada penelitian kuantitatif berupa data kuantitatif atau data angka. Jenis analisis data yang digunakan adalah analisis data bivariat yang terdiri dari dua variabel pokok (Kriyantono 2006: 165).

Sedangkan uji statistik yang dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif eksplanatif dalam pendekatan survei adalah statistik inferensial yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel. Sehubungan dengan skala masing-masing variabel penelitian ini adalah ordinal-ordinal maka peneliti dapat menggunakan *Kendall's Tau* dan dihitung menggunakan program *SPSS for Windows Version 24*.

## **2. Hasil dan Pembahasan**

Survei penelitian ini diisi oleh 100 responden yang tersebar di berbagai kecamatan di DKI Jakarta. Mayoritas responden adalah laki-laki (59%) dan yang lainnya adalah perempuan (41%). Responden yang berusia 25-29 tahun menempati porsi yang besar pada survei ini, yakni sebesar 38%. Mahasiswa juga mendominasi survei ini dengan persentase sebesar 34%. Profil sebaran responden penelitian ini dapat terlihat melalui tabel berikut:

**Tabel 04.** Sebaran Responden

Identitas Responden			Identitas Responden		
Jenis Kelamin	Laki-Laki	59	Pekerjaan	Pelajar	5
	Perempuan	41		Mahasiswa	34
				PNS	8
Umur	17-21 tahun	27		Profesional	11
	22-24 tahun	8		Pengusaha/Wiraswasta	3
	25-29 tahun	38		Pegawai swasta	33
	30-40 tahun	23		Ibu Rumah Tangga	3
	41-55 tahun	3		Lainnya	3
	>55 tahun	1			
			Agama	Islam	76
Pendidikan	SMA	28		Kristen	15
	S1	48		Katolik	2
	Pasca Sarjana	24		Hindu	6
				Khonghucu	1

Sumber: Hasil olah penelitian

Selanjutnya, peneliti melakukan uji validitas pada data yang sebelumnya diperoleh melalui teknik survei agar dapat ditemukan hubungan antar variabelnya. Uji validitas dilakukan untuk melihat apakah alat ukur penelitian yang diterapkan dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. Alat ukur penelitian dalam hal ini adalah berbagai pertanyaan terkait penelitian yang dituangkan dalam bentuk kuesioner. Uji validitas alat ukur ini dilakukan dengan uji korelasi seluruh kategori atau pertanyaan penelitian untuk dilihat skornya dengan menggunakan rumus *Pearson Product Moment*. Berikut hasil uji korelasi pada kategori/pertanyaan penelitian:



**Tabel 05.** Uji Validitas Pola Konsumsi Berita Korupsi

		Frekuensi konsumsi berita korupsi bernada negatif	Motivasi untuk mengonsumsi berita korupsi paslon	Tingkat pemenuhan kebutuhan atas berita korupsi paslon
Frekuensi konsumsi berita korupsi bernada negatif	Pearson Correlation	1	.414**	.217*
	Sig. (1-tailed)		0.000	0.015
	N	100	100	100
Motivasi untuk mengonsumsi berita korupsi paslon	Pearson Correlation	.414**	1	.436**
	Sig. (1-tailed)	0.000		0.000
	N	100	100	100
Tingkat pemenuhan kebutuhan atas berita korupsi paslon	Pearson Correlation	.217*	.436**	1
	Sig. (1-tailed)	0.015	0.000	
	N	100	100	100

Sumber: Hasil olah penelitian

**Tabel 06.** Uji Validitas Intensitas Diskusi Berita Korupsi

		Kedekatan dengan teman diskusi	Mendukung paslon yang sama	Menganggap diskusi sebagai sumber yang relevan dan terpercaya	Kuantitas informasi yang diterima dari lingkungan terdekat
kedekatan dengan teman diskusi	Pearson Correlation	1	.741**	.852**	.802**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000
	N	100	100	100	100
mendukung paslon yang sama	Pearson Correlation	.741**	1	.876**	.799**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000
	N	100	100	100	100
menganggap diskusi sebagai sumber yang relevan dan terpercaya	Pearson Correlation	.852**	.876**	1	.847**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000
	N	100	100	100	100
kuantitas informasi yang diterima dari lingkungan terdekat	Pearson Correlation	.802**	.799**	.847**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	
	N	100	100	100	100

Sumber: Hasil olah penelitian.

**Tabel 07.** Uji Validitas Partisipasi Politik Konstituen

		Mengajak orang lain berpartisipasi	Tidak percaya dengan berita negatif paslon	Memberikan suara pada paslon
Mengajak orang lain berpartisipasi	Pearson Correlation	1	.708**	.753**
	Sig. (1-tailed)		0.000	0.000
	N	100	100	100
Tidak percaya dengan berita negatif paslon	Pearson Correlation	.708**	1	.684**
	Sig. (1-tailed)	0.000		0.000
	N	100	100	100
Memberikan suara pada paslon	Pearson Correlation	.753**	.684**	1
	Sig. (1-tailed)	0.000	0.000	
	N	100	100	100

Sumber: Hasil olah penelitian.

Uji validitas pada ketiga tabel tersebut dimaksudkan untuk menguji kategori/pertanyaan yang mewakili dua variabel independen berupa Pola Konsumsi Berita Korupsi dan Intensitas Diskusi Berita Korupsi, serta variabel dependen berupa Partisipasi Politik Konstituen. Kategori/pertanyaan tersebut berisi seputar aktivitas responden dalam mengonsumsi berita korupsi yang melibatkan para pasangan calon; aktivitas diskusi mengenai berita korupsi dan politik; serta tingkat partisipasi responden dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hasil uji dengan menggunakan *Pearson Product Moment* pada ketiga kelompok kategori/pertanyaan tersebut memiliki nilai signifikansi  $<0,01$  atau  $<0,05$  sehingga bersifat valid. Hal tersebut menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun pertanyaan kuesioner bernilai valid sehingga dapat digunakan untuk mengukur hasil penelitian ini.

Peneliti kemudian melakukan uji korelasi dengan menggunakan rumus *Kendall's Tau* untuk melihat hubungan antar variabel penelitian. Hasil uji korelasi tersebut dapat ditemukan pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 08.** Uji Korelasi Pola Konsumsi dengan Intensitas Diskusi Berita Korupsi

			Intensitas Diskusi Berita Politik	Pola konsumsi berita korupsi paslon
Kendall's tau_b	Intensitas Diskusi Berita Politik	Correlation Coefficient	1.000	.334**
		Sig. (2-tailed)		0.000
		N	100	100
	Pola konsumsi berita korupsi paslon	Correlation Coefficient	.334**	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.000	
		N	100	100

Sumber: Hasil olah penelitian.

Tabel di atas menunjukkan hasil uji korelasi yang positif antara Pola Konsumsi dengan Intensitas Diskusi Berita Korupsi. Hal tersebut ditunjukkan melalui perolehan *Correlation Coefficient* ( $r$ ) sebesar 0,334 dengan signifikansi 0,000. Signifikansi  $0,000 < 0,05$  menunjukkan adanya korelasi yang signifikan, sedangkan ( $r$ ) = 0,334 menunjukkan korelasi yang cukup kuat.

Konstituen yang sering bertukar pikiran tentang isu-isu terkini seputar paslon yang mereka dukung cenderung akan semakin termotivasi untuk mencari informasi lebih banyak mengenai paslon yang mereka dukung melalui berbagai kanal media, termasuk media daring. Dengan demikian, mereka akan merasa bahwa kebutuhan mereka dalam mengikuti perkembangan berita kasus korupsi yang menyebutkan nama para paslon yang mereka dukung menjadi terpenuhi meskipun terdapat berita-berita yang memberitakan para paslon tersebut secara negatif. Hal tersebut hanya berlaku ketika sekelompok konstituen mendukung satu palon yang sama.

Sekelompok konstituen yang memiliki hubungan dekat cenderung saling menukarkan *link* berita atau mendiskusikan berita korupsi yang menyajikan paslon yang mereka dukung. Semakin tinggi frekuensi diskusi atau berbagi tautan yang mereka lakukan maka

mereka semakin lebih mengandalkan aktivitas diskusi tersebut sebagai sumber referensi utama mereka. Mereka cenderung lebih mudah memahami pengetahuan baru yang bersumber dari teman-teman terdekatnya daripada yang bersumber dari media daring.

Selanjutnya adalah hasil Uji Korelasi Pola Konsumsi Berita Korupsi dengan Partisipasi Politik Konstituen.

**Tabel 09.** Uji Korelasi Pola Konsumsi Berita Korupsi dengan Partisipasi Politik Konstituen

		Pola konsumsi berita korupsi paslon	Partisipasi politik konstituen
Kendall's tau_b	Pola konsumsi berita korupsi paslon	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (1-tailed)	.330**
		N	100
	Partisipasi politik konstituen	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (1-tailed)	0.000
		N	100

Sumber: Hasil olah penelitian.

Tabel di atas menunjukkan bahwa signifikansi antar variabel adalah  $0.000 < 0.05$  sehingga terdapat korelasi yang signifikan. Sedangkan nilai  $(r) = 0,330$  menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat. Oleh karenanya, hasil uji tersebut menunjukkan adanya hubungan antara Pola Konsumsi Berita Korupsi dengan Partisipasi Politik Konstituen. Uji korelasi variabel selanjutnya terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 10.** Uji Korelasi Intensitas Diskusi Berita Korupsi dengan Partisipasi Politik Konstituen

		Intensitas Diskusi Berita Politik	Partisipasi politik konstituen
<i>Kendall's tau_b</i>	Intensitas Diskusi Berita Politik	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (1-tailed)	.917**
		N	100
	Partisipasi politik konstituen	Correlation Coefficient	.917**
		Sig. (1-tailed)	1.000
		N	100

Sumber: Hasil olah penelitian.

Tabel 10. Uji Korelasi Intensitas Diskusi Berita Korupsi dengan Partisipasi Politik Konstituen menunjukkan adanya signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga terdapat korelasi yang signifikan. Selain itu, nilai ( $r$ ) = 0,917 menunjukkan adanya korelasi yang sangat tinggi. Hasil uji korelasi antarvariabel pada ketiga tabel tersebut menunjukkan bahwa Pola Konsumsi Berita Korupsi memiliki hubungan yang resiprokal secara kuat dengan Intensitas Diskusi Berita Korupsi. Selain itu, terdapat hubungan yang kuat antara Pola Konsumsi Berita Korupsi dengan Partisipasi Politik Konstituen. Selanjutnya terdapat hubungan antara Intensitas Diskusi Berita Korupsi dengan Partisipasi Politik Konstituen.

### **Aktivitas diskusi antara sesama pendukung paslon sebagai faktor dominan pada partisipasi politik konstituen**

Berita mengenai korupsi yang melibatkan para kandidat sebagai saksi maupun tersangka pada pemberitaan menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Pertama lalu menjadi informasi yang banyak dikonsumsi oleh khalayak, termasuk para konstituen politiknya. Para pendukung kandidat yang aktif mengonsumsi berita korupsi mereka akan semakin sering mendiskusikan topik tersebut dengan

orang-orang terdekatnya, seperti teman, sahabat, maupun keluarga. Begitu pun sebaliknya, para pendukung yang sering membicarakan isu korupsi para paslon juga akan semakin tinggi dalam mengonsumsi berita korupsi mereka.

Semakin sering seseorang membaca berita korupsi maka akan semakin sering pula dirinya membagi isu korupsi tersebut dengan teman-teman di lingkaran terdekatnya. Sebaliknya, ketika para konstituen yang memiliki hubungan dekat ini sama-sama mendukung paslon tertentu yang sama maka akan semakin tinggi pula motivasi para pendukung ini untuk mencari-cari berita yang berkenaan dengan para paslon yang terlibat kasus korupsi. Semakin rendah frekuensi para konstituen dalam mengonsumsi berita korupsi bernada negatif dari paslon yang didukungnya maka akan semakin berkurang minat para pendukung ini untuk membahas kasus-kasus korupsi tersebut. Pendukung yang menganggap teman-temannya sebagai sumber informasi yang relevan dan tepercaya maka akan termotivasi untuk menggali berita korupsi sejenis dari berita daring.

Temuan yang menarik, frekuensi konsumsi berita korupsi memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kepuasan atas terpenuhinya kebutuhan akan informasi berupa korupsi yang melibatkan paslon, namun hubungan tersebut tidak terlalu kuat. Para konstituen merasa lebih puas dan terpenuhi kebutuhan informasinya dengan tingginya kuantitas informasi yang diberikan orang-orang terdekatnya. Semakin tinggi kepercayaan seorang pendukung terhadap informasi yang diperolehnya dari orang terdekatnya maka semakin terpenuhi pula kebutuhannya akan informasi dan semakin tinggi pula motivasinya untuk mencari kembali informasi serupa di berita daring.

Pendukung yang memiliki partisipasi politik yang tinggi, lebih memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap informasi yang diterimanya dari orang-orang terdekatnya. Seseorang akan lebih memercayai tautan yang dikirimkan oleh temannya di grup obrolan daripada memercayai informasi yang diperolehnya dari media daring. Seorang konstituen akan lebih memercayai obrolan mengenai isu

korupsi bersama keluarganya dari pada informasi yang diperolehnya dari berita daring.

Partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh seorang pendukung dapat beraneka ragam wujudnya, seperti partisipasi secara langsung yang dapat dilihat oleh orang lain. Partisipasi juga dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Partisipasi politik juga dapat dilakukan dalam suatu bentuk dukungan maupun penentangan. Selanjutnya, ketika seorang pendukung semakin tidak memercayai berita korupsi bernada negatif tentang paslon yang didukungnya maka akan semakin tinggi partisipasinya dalam mengajak orang-orang lain di sekitarnya serta partisipasi dalam pemberian suara.

Pendukung yang sering berbagi informasi dan pendapat dengan sesamanya akan semakin tidak percaya dengan isi berita korupsi. Selanjutnya, pendukung juga akan semakin mencari referensi tambahan di berita daring yang kemudian akan dibagikannya lagi pada orang-orang terdekatnya yang juga kepada sesama pendukung yang dipercayainya. Hubungan seperti ini akan terjadi secara simultan dalam bentuk dukungan yang tak terputus pula.

Seorang konstituen yang semakin sering mengonsumsi berita korupsi bernada negatif akan semakin meningkat tingkat partisipasi politiknya. Pendukung yang memiliki motivasi yang tinggi dalam membaca berita korupsi di media daring, akan semakin sering mengajak orang lain untuk berpartisipasi secara sama dengannya dan kemudian menyebarkan berita *online* tersebut melalui tautan-tautan di berbagai grup obrolan. Tingkat pemenuhan kebutuhan akan berita politik atas paslon yang didukungnya akan semakin memotivasinya untuk memberikan suaranya pada paslon tersebut.

Pemenuhan kebutuhan akan berita korupsi yang tercapai melalui hasil diskusi dengan orang-orang terdekatnya dapat semakin membuatnya yakin dalam menentukan pilihan dan selanjutnya memberikan suaranya. Semakin tinggi intensitas diskusi yang dilakukan oleh sesama pendukung suatu paslon, maka akan semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya. Semakin dekat hubungan yang terjalin antara konstituen dengan rekan diskusinya, maka akan

semakin sinkron bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh keduanya. Hubungan antara pola konsumsi berita korupsi dan intensitas diskusi berita korupsi dengan partisipasi para konstituen memang memiliki signifikansi yang valid. Namun, interaksi sosial dan antarpribadi yang dihasilkan dari lingkungan di sekitarnya lebih menentukan tingkat partisipasi politik yang dilakukan. Meskipun para paslon yang mereka dukung turut disebutkan dalam beberapa berita korupsi, namun pendapat kelompok yang terbentuk di antara para pendukung paslon yang sama memiliki pengaruh yang lebih kuat.

## PENUTUP

Berita korupsi menjadi isu yang penting dalam penentuan preferensi pemilih. Berbagai media merasa penting untuk mendiseminasikan pesan-pesan Pilkada DKI Jakarta 2017 memerlukan pengawasan publik melalui pembeberan sejumlah berita korupsi berbagai perspektif yang turut memboyong hampir keseluruhan nama kandidat yang sedang mencalonkan diri. Media masih memiliki kekuatan dalam menentukan bagaimana perspektif publik dan selanjutnya menjadi *basic belief* seorang konstituen.

Namun, hubungan yang tak cukup kuat antara konsumsi media dengan partisipasi yang terbentuk tersebut, turut dikalahkan oleh hubungan yang dimiliki antara keberadaan relasi pribadi dan sosial yang intim. Hal ini berarti, kondisi lingkungan sekitar, seperti dalam keluarga, hubungan pertemanan di kampus, relasi di tempat kerja, atau bahkan komunitaslah yang paling menentukan bagaimana persepsi seorang konstituen terhadap para paslon.

Melalui riset ini, peneliti ingin menekankan bahwa upaya untuk menegakkan suatu sikap antikorupsi tak hanya diperankan oleh media, tetapi juga memainkan peran pengaruh dari orang-orang terdekat di sekitar. Kampanye antikorupsi di sektor politik dapat dimulai pada komunitas-komunitas kecil yang memiliki anggota-anggota yang solid, ataupun pada lembaga pendidikan dan unit-unit kepegawaian di Indonesia. Keluarga sebagai unit sosial terkecil dapat juga



dijadikan sebagai sasaran kampanye antikorupsi di sektor politik, namun signifikansinya lebih kecil dibandingkan dengan unit yang lainnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa keluasan variabel independen yang memberikan banyak pilihan. Banyak variabel-variabel independen yang jika ditinjau dari teori *Uses and Gratification* dapat berkaitan dengan partisipasi politik. Oleh karenanya, penelitian ini belum mampu untuk menjelaskan bagaimana variabel-variabel lainnya yang lebih berkorelasi. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi bagaimana bentuk-bentuk relasi sosial atau antarpersonal yang memengaruhi preferensi politik pemilih, misalnya dalam relasi keluarga dan tempat kerja.

## REFERENSI

- Anugerah, Pijar. (2016, 28 Januari). Pemberantasan Korupsi Indonesia pada 2015 'Membaik'. BBC Indonesia. Diakses dari [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/01/160127\\_indonesia\\_indeks\\_korupsi](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160127_indonesia_indeks_korupsi).
- Babbie, Earl. (2008). *The Basic of Social Research*. Belmont: Wadsworth.
- Baran, Stanley J., dan Davis, Dennis K. (2012). *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future. Sixth Edition*. Boston: Wadsworth.
- Indonesian Corruption Watch. (2014). Tren Pemberantasan Korupsi 2014. Diakses dari <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Kajian/Trend%20Korupsi%20Tahun%202014.pdf>
- Indonesia-investments.com. (2017, 7 Maret). Korupsi di Indonesia. Diakses dari <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/korupsi/item235>.
- Kriyantono, Rachmat. (2009). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.

- Ndoda, Gladys Ruvimbo. (2014). Corporate Governance and Ethical Behaviour: The Case of the Zimbabwe Broadcasting Corporation. *Journal of Academic and Business Ethics*, 9, 1-8.
- Nimmo, Dan. (2005). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Rosda Karya.
- Nimmo, Dan. (2006). *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Rosda Karya.
- Putra, Nanda Perdana. (2017, 6 April). DPT Pilkada DKI 2017 Putaran Kedua Capai 7.218.254 Pemilih. Diakses dari <http://pilkada.liputan6.com/read/2912558/dpt-pilkada-dki-2017-putaran-kedua-capai-7218254-pemilih>.
- Ruben, Brent D, dan Stewart, Lea P. (2006). *Communication and Human Behaviour*. New York: Pearson Education.
- Tempo.co. (2016, 27 Januari). Ini Daftar Peringkat Korupsi Dunia, Indonesia Urutan Berapa? Diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa>.
- West, Richard, dan Turner, Lynn H. (2007). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. New York: McGraw-Hill.
- Wibisono, B. Kunto. (2012, 19 November). INES: Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberantasan Korupsi Rendah. [antaraneews.com](http://www.antaraneews.com). Diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/344244/ines-kepuasan-masyarakat-terhadap-pemberantasan-korupsi-rendah>.